

MONITORING



Indonesia for Global Justice

FTA's HIGHLIGHT Edisi November, 2018



FTAs Hightlight ini adalah monitoring IGJ yang dilakukan secara berkala setiap satu bulan, yang berisi mengenai sorotan singkat peristiwa-peristiwa yang terjadi disepanjang bulan mengenai kebijakan perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah, termasuk perkembangan putaran perundingan perjanjian perdagangan bebas dan isu mengenai perdagangan global

Indonesia dan EFTA Selesaikan Perjanjian Perdagangan Bebas

- Indonesia dan Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss yang tergabung dalam European Free Trade Association (EFTA) telah menyelesaikan Perundingan Indonesia-European Free Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) 1 November 2018 di Bali.
- Satu tahun terakhir Indonesia telah menyelesaikan tiga perundingan yaitu IC-CEPA dengan Chile pada Desember 2017. IA-CEPA dengan Australia pada Agustus 2018 dan IECEPA pada November 2018.
- Selesaiannya IE-CEPA merupakan pencapaian yang luar biasa bagi kedua pihak karena Indonesia memiliki kesempatan yang lebih luas masuk EFTA yang mempunyai kemitraan dengan Uni Eropa. Langkah selanjutnya adalah melakukan *legal scrubbing* dan terjemahan.
- Perjanjian kemitraan IE-CEPA akan mendorong pembukaan akses pasar yang lebih luas, peningkatan ekspor barang dan jasa, investasi dan program program kerja sama yang akan didapatkan dari negara anggota EFTA. Perjanjian ini juga dianggap bisa menjadi pintu masuk produk ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa.
- Pada 7 Juli 2010, perundingan IE-CEPA diluncurkan berdasarkan prinsip komprehensif, saling menghargai dan kesepakatan saling menguntungkan. Setelah berlangsung selama sembilan putaran, perundingan dihentikan sementara pada 2014 karena proses pergantian pemerintahan Indonesia. Pada 2016, Indonesia dan EFTA sepakat melanjutkan perundingan dan menargetkan selesai pada 2018.
- EFTA adalah tujuan ekspor Indonesia urutan ke-23 dan asal impor ke-25 dengan nilai perdagangan Indonesia dan EFTA pada 2017 mencapai US\$ 2,4 miliar.
- Produk ekspor Indonesia adalah perhiasan, emas dan perangkat optik. Sementara nilai investasi negara EFTA di Indonesia pada 2017 mencapai US\$ 621 juta.

Ini Kerugian Jika RI Tak Meratifikasi 7 Perjanjian Perdagangan Internasional

- Pemerintah segera menetapkan dan menyelesaikan proses ratifikasi tujuh perjanjian perdagangan internasional (PPI) melalui Peraturan Presiden.
- Penetapan ratifikasi ini akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden, karena sebelumnya ketujuh PPI ini juga secara bertahap telah disampaikan ke DPR, lebih dari 60 hari yang lalu.
- Ratifikasi tujuh perjanjian perdagangan internasional ini antara lain ASEAN Agreement on Medical Device Directive (AMDD), First Protocol to Amend the ASEAN-Australasia-New Zealand FTA (AANZFTA), Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under ASEAN-Korea FTA (AKFTA), Protocol to Amend the Framework Agreement under ASEAN-China FTA (ACFTA), Protocol to Implement the 9th Package of ASEAN Framework Agreement on Services (the 9th AFAS Package), dan Agreement on Trade in Service under the ASEAN-India FTA (AITISA) dan Protocol to Amend Indonesia-Pakistan PTA (IP-PTA).
- Potensi kerugian bila Indonesia tidak meratifikasi 7 PPI tersebut. Misalnya pada perjanjian AANZFTA, akan ada dua kerugian, yaitu 11 parties akan menolak SKA (versi lama) sehingga produk Indonesia tidak dapat memanfaatkan preferensi tarif dalam AANZFTA.
- Untuk AITISA, Indonesia tidak dapat mengakses pasar tenaga profesional di sektor konstruksi, travel, komunikasi, jasa bisnis lainnya (posisi high and middle management), dan jasa rekreasi yang menjadi keunggulan Indonesia, India.

Negosiasi RCEP Tak Kunjung Rampung

- Negara-negara calon anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) belum membuat kesepakatan hubungan kerja sama ekonomi tersebut masih belum rampung.
- Direktur Jenderal (Dirjen) Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) merangkap Ketua Trade Negotiating Committee Regional Comprehensive Economic Partnership (TNC RCEP) Iman Pambagyo mengatakan negosiasi antarnegara mitra masih terus berlangsung.
- Menurut dia, jika pun ada kesepakatan FTA antarnegara calon anggota, negara lain yang ingin masuk RCEP harusnya juga mendapatkan informasi lengkap agar tidak terkena tarif dagang yang tidak perlu.
- Selain ketiadaan kerangka FTA yang harusnya menjadi landasan, perubahan politik yang diiringi pergantian menteri di negara-negara Asean dan keenam mitranya membuat negosiasi sering tidak menghasilkan perkembangan signifikan. Contohnya, Malaysia yang masih mempersoalkan penyelesaian sengketa dalam kesepakatan *Sanitary and Phytosanitary* (PSP).

- Selain itu, delegasi Jepang juga belum satu pendapat mengenai pengenaan tarif pada produk pertanian dari China. Begitu pula sebaliknya.
- Catatan, negosiasi RCEP diinisiasi sejak November 2012 dan dipandang sebagai tandingan pakta kerja sama Trans Pacific Partnership (TPP). Selain negara-negara Asean, enam negara mitra yang turut terlibat dalam RCEP adalah Australia, Selandia Baru, China, India, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel).

RCEP Terganjil Sikap Pemerintah Jepang

- Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) tingkat menteri yang tengah berlangsung di Singapura belum sepenuhnya mencapai target perencanaan.
- Pembahasan ini merupakan rangkaian pertemuan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung pada 11-15 November 2018. Hadir dalam pertemuan tersebut, para Menteri Ekonomi peserta RCEP yang terdiri dari 10 Menteri Ekonomi ASEAN dan enam Menteri mitra perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) ASEAN yaitu Australia, India, Jepang, Korea, Tiongkok, dan Selandia Baru.
- Perundingan telah menegosiasikan tiga bab yaitu Kompetisi, Sanitary dan Phitosanitary (SPS), serta Standard, Regulasi Teknis dan Prosedur untuk Penilaian Kesesuaian (STRACAP). Namun pembahasan hanya mampu menyelesaikan dua bab saja. Beberapa bab yang tertunda penyelesaiannya disebabkan belum tercapai kesepakatan terkait isu bersifat keputusan politis terutama pemerintah Jepang.
- Sejak pertemuan Menteri RCEP pada Agustus lalu Jepang cenderung memaksakan kepentingannya dan tidak bersedia menunjukkan fleksibilitasnya. Padahal, negara peserta RCEP lainnya bersikap sebaliknya dengan menunjukkan fleksibilitasnya atas kepentingan Jepang tersebut.
- Para Menteri berencana untuk melaporkan kemajuan perundingan RCEP saat Pertemuan KTT RCEP ke-2. Kemajuan substansial perundingan akan diumumkan dan masing-masing Kepala Negara anggota RCEP diharapkan memberikan komitmen politik yang lebih besar untuk mendorong penyelesaian perundingan RCEP.
- Perundingan RCEP ini diharapkan mencapai penyelesaian yang baik agar menjadi FTA regional terbesar di dunia. Hasil kesepakatan bisa mencakup lebih dari 48 persen penduduk dunia, 38 persen Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP) dunia, dan sekitar 42 persen dari perdagangan dunia.

Negosiasi Kesepakatan RCEP Bakal Rampung pada 2019

- Negara anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) menegaskan akan segera menyudahi negosiasi RCEP pada 2019.
- Negara yang tergabung dalam pembahasan RCEP antara lain negara ASEAN free trade agreement, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, Myanmar, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos. Sementara 6 negara mitra perjanjian

perdagangan bebas (Free Trade Agreement) ASEAN adalah China, Australia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

- Kepala negara/pemerintahan anggota RCEP mencatat bahwa tugas untuk menyimpulkan negosiasi menjadi lebih mendesak dan signifikan mengingat tantangan yang dihadapi saat ini dalam konteks ekonomi global.
- Dalam hal ini, kami melakukan komitmen bersama untuk menyelesaikan negosiasi RCEP dengan cepat untuk mengembangkan sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan.
- Para pemimpin menyambut kesepakatan 7 Bab dalam perjanjian RCEP, yaitu Kerja sama Ekonomi dan Teknis (ECOTECH), Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Prosedur Kepabeanaan dan Fasilitasi Perdagangan (CPTF), Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Government Procurement), Institutional Provision, Sanitary dan Phitosanitary (SPS), serta Standard, Regulasi Teknis dan Prosedur untuk Penilaian Kesesuaian (STRACAP).
- Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-33, para Menteri Ekonomi peserta RCEP yang terdiri dari 10 Menteri Ekonomi ASEAN dan 6 Menteri mitra perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) ASEAN yaitu Australia, India, Jepang, Korea, China, dan Selandia Baru membahas 8 bab dari 21 bab perjanjian RCEP.

Negara ASEAN Sepakat Wujudkan Ekonomi Digital Terintegrasi

- Negara-negara anggota ASEAN sepakat meningkatkan ekonomi digital dengan menandatangani Perjanjian Pengembangan Niaga Elektronik (ASEAN Agreement on E-Commerce). Promosi sekaligus fasilitas inovasi dan pergerakan perniagaan bakal terintegrasi secara elektronik (niaga-el).
- Ketentuan pada perjanjian ini mengatur perdagangan lintas batas antar negara negara anggota ASEAN dan lokalisasi fasilitas komputerisasi. Negara-negara di kawasan ASEAN juga didorong untuk mewujudkan sistem pembayaran elektronik yang aman dan saling terintegrasi satu sama lain.
- Dampak positif juga diyakini akan signifikan bagi Indonesia. Pada saat yang bersamaan tumbuhnya aktivitas bisnis termasuk skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti usaha rintisan tengah didorong. Target menjadi perekonomian digital terbesar pada 2020 juga diharapkan bakal terwujud sesuai peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik 2017-2019.
- Perjanjian tersebut diantaranya di bidang perdagangan Bbarang (Protocol to Amend ATIGA, ditandatangani bulan Agustus lalu), perdagangan Jljasa (Protocol to Implement the 10th AFAS Package, ditandatangani bulan Agustus, dan ASEAN Trade in Services Agreement/ATISA, akan ditandatangani bulan Maret 2019) serta Investasi (The Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA, akan ditandatangani bulan Maret 2019).

- Para Menteri Ekonomi ASEAN juga mendorong ASEAN untuk segera menyiapkan rencana kerja dalam meningkatkan kesiapan ASEAN menghadapi Revolusi Industri 4.0. Harapan ini sejalan dengan pengembangan ekonomi di Tanah Air yang segera merealisasikan Roadmap Making Indonesia 4.0 yang fokus pada sektor industri yaitu makanan dan minuman, otomotif, tekstil dan produk tekstil, elektronik dan kimia.
- Berbagai program dan inisiatif pun telah dan sedang diimplementasikan melalui pembangunan science techno park (STP). Tak hanya itu, pengembangan usaha rintisan digital dan digital talentserta pengembangan kota pintar juga turut dilakukan.
- Para Menteri mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan pembangunan Gedung Sekretariat ASEAN yang baru. Gedung itu akan mulai digunakan pada bulan Juni 2019, sedangkan gedung lama akan difungsikan sebagai kantor ASEAN-related Institution.

Agenda penting bulan Oktober :

1. Kemenangan Konstitusional Atas UU No.24/2000 Perjanjian Internasional

<http://igj.or.id/ Pernyataan-tim-advokasi-keadilan-ekonomi-pasca-putusan-mk-tentang-uu-perjanjian-internasional/>

Sekretariat IGJ

Komplek PLN, Jl.Laboratorium No.7, Duren Tiga, Pancoran,
Jakarta Selatan 12760, Indonesia

Kontak

Telp: +62 21 7984552

Email: igj@igj.or.id

Website: www.igj.or.id